

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Infaq

##### 1. Infak

###### a. Pengertian infak

Kata "infaq" berasal dari kata "*anfaqa-yunfiqu*" yang berarti pengeluaran atau keuangan. Arti kata "Infak" mungkin menjadi istimewa dalam hal memenuhi perintah Allah SWT. Dengan kata lain, infak hanya relevan dalam bentuk materi, ada infak yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada yang sunnah, bahkan ada yang haram.<sup>1</sup>

Kata infak tidak hanya diperuntukkan untuk sesuatu yang menyangkut hal yang wajib akan tetapi mencakup segala hal macam pengeluaran baik ikhlas maupun tidak ikhlas. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

*Artinya : Mereka yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, maka mereka tidak akan menyertai hadiah yang mereka berikan dengan menyebutkan hadiah, dan tidak akan diberi pahala karena menyakiti (perasaan penerima), mereka akan mendapatkan hubungan dengan pahala Tuhan. Mereka tidak peduli, dan mereka tidak (atau) merasa sedih. (Surat Al-Baqarah: 262).*

Infak berasal dari *Anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu demi sesuatu. Menurut istilah Infaq berarti mengeluarkan sebagian

---

<sup>1</sup>Garindra Mega Paksi, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia* (Malang : Penerbit Penaleh, Cet 1, 2020), 11.

dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.<sup>2</sup>

Dengan demikian, menurut pemahaman saya sebagai seorang peneliti bahwasanya infak secara etimologi ialah pemberian harta seseorang yang akan habis atau hilang dari kepemilikannya akan menjadi milik orang lain. Sedangkan secara terminologi ialah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam.

#### **b. Dasar Hukum Infak**

Dasar hukum infak di dalam Firman Allah SWT dan hadist Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar membelanjakan (menginfakkan) harta yang kita miliki. Dasar hukum infak di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 134, yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

*Artinya : (Yaitu) mereka yang menghabiskan (kekayaan) di alam liar dan dalam waktu singkat, dan mereka yang menekan amarah dan memaafkan (melakukan kesalahan) orang. Allah menyukai orang yang berbuat baik. (Surah Ali Imran : 134).*

Menurut Allah SWT di atas tidak ada nisab seperti zakat dalam infak, dimana infak dikeluarkan oleh setiap mukmin yang

---

<sup>2</sup> Didin Hafinuhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15

berpenghasilan tinggi atau rendah, bahkan dalam waktu yang terbatas atau sempit. Dibandingkan dengan zakat, zakat harus diberikan kepada orang *mustahik* tertentu (delapan *asnaf*), sedangkan infaq diberikan kepada kerabat atau orang lain.

Menurut undang-undang, infak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu infak wajib (zakat, kafarat, nadzar) dan infak sunnah (infak yang diberikan secara sukarela untuk orang yang membutuhkan), seperti infaq untuk orang miskin, bencana alam atau bantuan kemanusiaan lainnya. Selain itu, infak dapat berarti sedekah yang merupakan ungkapan kejujuran iman seseorang kepada Allah SWT. Karenanya, Allah SWT menggabungkan orang-orang yang memberi harta di jalan Allah SWT dengan orang-orang yang membenarkan adanya pahala yang baik.

### c. **Macam-Macam Infak**

Infak secara hukum dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

#### 1) Infak wajib

Infak wajib ialah mengeluarkan harta untuk perkara-perkara wajib diantaranya :

- a) Bayar Mahar (mas kawin)
- b) Menafkahi isteri
- c) Menafkahi isteri yang ditalak dan masih dalam ibadah

## 2) Infak sunnah

Infak Sunnah ialah mengeluarkan harta dengan niat shadaqah.

Infak dalam jenis ini terdapat dua jenis:

- a) Infak untuk jihad
- b) Infak kepada yang sedang membutuhkan

## 3) Infak mubah

Infak mubah ialah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti perdagangan, dan menanam.

## 4) Infak haram

Infak haram ialah mengeluarkan harta dengan niat untuk diharamkan oleh Allah swt seperti berikut:

- a) Infak orang-orang yang kafir bertujuan untuk menghalangi Syari'ah Islam
- b) Infak umat Islam kepada orang miskin tetapi bukan kerana Tuhan.

### **d. Rukun dan Syarat Infak**

Rukun dan syarat infak harus memenuhi beberapa unsur agar apa yang dilakukan dapat dianggap efektif. Infak memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur tersebut yakni rukun infak dimana infak dapat dibilang sah ketika sudah memenuhi rukun infak dan syarat barang yang di infakkan. Dalam infak memiliki empat rukun, yaitu : <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abd- Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fidh Ala Al-Madzahib Al-Arba'an*, Juz II (Bairut : Dar Al-Kutub Allmiah, 2003), 140.

1) Pemberi infak (*muwafiq*), *muwafiq* harus memenuhi syarat seperti berikut:

- a) Mempunyai apa yang sedang diinfakkan
- b) *Muwafiq* bukanlah orang yang menyekat haknya kerana alasan
- c) Orang dewasa, bukan seorang kanak-kanak dengan keupayaan yang kurang
- d) *Muwafiq* tidak dipaksa, kerana infak adalah kontrak yang memerlukan kebajikan dalam kesahihannya

2) Penerima infak (*muwafiq lahu*), *muwafiq lahu* harus memenuhi syarat berikut:

- a) Ada benar-benar masa yang diberikan kepada *muwafiq lahu*, apabila sama sekali tidak ada atau dianggarkan, contohnya dalam bentuk janin maka infak itu tidak ada.
- b) orang dewasa atau akil baligh apabila orang yang diberi infak ada disaat infak diberikan, tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak diambil oleh walinya atau orang yang mendidiknya walaupun ia adalah orang asing.

3) Barang yang diinfakkan, makna dari barang yang diinfakkan, harus memenuhi syarat berikut:

- a) Benar-benar ada
- b) Harta bernilai
- c) Boleh dapat memiliki bahannya, yang menyiratkan apa yang biasanya dimiliki, berasal dari peredarannya, dan pemilikannya

boleh berpindah tangan. Jadi yang tidak sah adalah untuk mengenakan air di sungai, ikan di laut atau burung di udara.

- d) Tidak ada tempat yang dimiliki oleh penginfak, seperti yang diinfakkan kepada tumbuh-tumbuhan, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Tetapi apa yang diinfakkan diwajibkan dipisahkan dan diserahkan kepada *muwafiq lahu* yang diberikan untuk menjadi harta dia.<sup>4</sup>

#### 4) Penyerahan (*ijab qabul*)

Walau bagaimanapun, infak itu sah melalui *ijab qabul*, bagaimanapun, bentuk *ijab qabul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta yang menganggur. Sebagai contoh, penginfak itu berkata: Saya infakan kepada anda; Saya memberi anda; atau yang sama; sementara yang lain berkata; Ya saya terima. Imam Malik dan Asy-Syafi berpendapat "Saya fikir dia memegang *ijab qabul* di infak. Orang Hanafi berpendapat bahawa Ijab sudah cukup, dan itulah yang paling Shahih. Walaupun orang Hambali berpendapat: infak itu sah dengan hadiah yang menunjukkan kepadanya; kerana Rasulullah saw telah diberikan dan memberikan hadiah. Begitu juga para sahabat dan tidak berasal dari mereka bahawa mereka memerlukan Qabul Ijab.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 166-167

<sup>5</sup> Ibid

#### e. Hikmah Infak

Hikmah Dalam menyalurkan infak terdapat manfaat yang akan di paparkan peneliti sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat atau *ummah*, pengelolaan donasi yang tepat akan mampu menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan..
- 2) Sebagai sarana kerawanan sosial, kerawanan sosial telah menjadi salah satu masalah kemanusiaan dalam kehidupan manusia, yaitu kemiskinan belum teratasi dengan baik. Sistem sosialis dan sistem kapitalis mempromosikan konsep mereka sendiri, tetapi gagal menyelesaikan masalah ekonomi. Infak diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat
- 3) Sebagai sarana bela manusia, situasi dimana harkat dan martabat manusia seringkali terabaikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Sebagai sarana pemuliaan manusia (*riqab*), yang mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan merdeka dan mulia, hanya saja terkadang seperti diabaikan.
- 5) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti luhur, bersyukur atas keberkahannya, menumbuhkan ketentraman hidup, serta membersihkan dan mengembangkan harta benda.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama infak menurut Islam adalah mempertahankan harmoni ekonomi di

masyarakat. infak membantu kaum fakir miskin dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan membangun untuk tujuan umum. Nabi Muhammad SAW mendorong umat-Nya untuk memberi sedekah kepada orang miskin yang membutuhkan. Sehingga mereka mungkin dapat menghindari kekikiran. Sehingga itu, khalifah benar-benar terbimbing dan para sahabat lain dari Nabi bertindak atas dasar ajaran Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, masyarakat yang baik adalah orang-orang yang memberi manfaat kepada banyak orang (kebaikan mereka) untuk orang lain. Kerana dilihat dari pengertian infak di atas adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta. Beberapa jumlah terbaik diserahkan, setiap kali ia mendapat banyak rizki yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial, ini adalah benar kepada umat Islam untuk mengkritik individu dan sebaliknya sangat menekan pembinaan semangat Ukhuwah, bahkan semangat ukhuwah adalah salah satu risalah Islam yang sangat menonjol. Kita dapat melihat keseriusan Islam melihat masalah pembinaan ukhuwah ini dalam ajarannya di mana zakat, infaq



dan shodaqoh. infak ini mengajar kita perkara yang sangat penting bahawa Islam mengakui hak-hak peribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahawa dalam pemilikan pribadi terdapat tanggungjawab sosial.

**f. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infak dan Shadaqah**

Persamaan antara zakat, infak, dan shadaqah adalah ketiganya merupakan aset yang dialokasikan khusus untuk kelompok atau orang tertentu dan juga dialokasikan dalam kondisi tertentu. Selain itu zakat, infak dan shadaqah merupakan pemberian bagi orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup yang membutuhkan.

Perbedaan zakat, infaq dan shadaqah adalah harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat-syarat yang harus memenuhi batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisab*), sedangkan aset yang digunakan untuk infak dan shadaqah tidak memiliki syarat khusus. Selain itu, zakat dan infak yang dibagikan adalah aset materiil, dan shadaqah tidak hanya berupa aset materi, tetapi juga dalam bentuk non-materi, seperti tersenyum kepada orang yang kita kenal. Selain itu, dalam zakat, infak memiliki ketentuan mengenai penerima hak, sedangkan shadaqah tidak ada ketentuan. Selanjutnya zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan shadaqah adalah sunnah atau tidak wajib. Selain itu, zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqah tidak ada.

Kotak koin NU LAZISNU, Kota Kediri dimasukkan ke dalam infak, dan seseorang menggunakan sebagian harta atau penghasilannya untuk kepentingan tata tertib hukum Islam. Alasan memasukkan koin NU ini ke dalam kategori infak adalah karena tidak ada aturan atau besaran berapa yang harus dikeluarkan setiap orang, yang berbeda dengan zakat yang memiliki standar ukuran. Tujuan LAZISNU dengan koin NU ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya masyarakat NU. Hal ini tidak hanya menjadi pembelajaran bagi masyarakat, agar masyarakat dapat berdonasi untuk istiqomah dan meyakinkan mereka bahwa dengan memberikan kekayaan yang dimilikinya akan tidak dikonsumsi semua.

## **2. Pengelolaan Infak**

### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan ialah proses dalam melakukan kegiatan, merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan pada sebuah organisasi yang mana semua terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dengan mengikuti proses organisasi dimana keempat proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemindahan dan pemantauan akan membentuk manajemen dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid

## **b. Tata Cara Dasar Pengelolaan Infak**

Tata cara dasar dalam pengelolaan infaq adalah memberikan rizki melalui anugerah Allah SWT atau dengan ikhlas membelanjakan harta milik sendiri kepada orang lain. Dalam pengelolaan infak, baik perseorangan maupun badan hukum, aset infak diserahkan kepada yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban sebagian masyarakat, menjaga ketentraman dan menghindari kehidupan yang buruk.

Pemaparan Infak juga dijelaskan dalam buku *Asb-Siyasah Asy-Syar'iah*, kemudian Ibnu Taimiyyah menyebutkan pembagian yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab r.a: “Tidak ada orang yang berhak memperoleh harta adalah yang bermata. yang bertanggung jawab, yang mengalami cobaan, dan yang membutuhkan. Umar membagi mereka yang berhak memperoleh dana infak menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Orang yang kehilangan mata pencahariannya.
- 2) Orang-orang yang bertanggung jawab untuk melindungi Muslim, seperti pejabat dan cendekiawan untuk kepentingan Muslim dan dunia.
- 3) Orang-orang yang menghadapi ujian, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi umat Islam dari segala jenis kejahatan, seperti organisasi mujahidin, baik itu tentara, penasihat militer atau orang lain.
- 4) Orang yang sangat membutuhkan bantuan.

Syarat dan ketentuan yang mengatur pengelolaan infaak tidak jauh berbeda dengan zakat dan sedekah yang harus diperhatikan dalam mengatur hukum Syariah. Adapun syarat dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Memiliki akhlak yang amanah dan jujur,
- 4) Memahami dan memahami hukum ZIS, serta bertujuan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat tentang ZIS
- 5) Mampu melaksanakan tugas.

Seperti yang ditekankan Al-Quran, proses pendistribusian dana infak ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia dan tetap berada di jalur *Hizbullah*. Harta kekayaan harus digunakan untuk orang-orang yang kurang beruntung di masyarakat, seperti orang miskin, orang miskin dan lainnya, untuk mencapai sirkulasi kekayaan yang baik. Pelaksanaan kewajiban harus sesuai dengan ketentuan langkah-langkah yang telah diambil, jika ditingkatkan tidak boleh kurang, tetapi harus lebih baik. Sedangkan untuk infak tidak ada aturan ukuran yang jelas, tergantung setiap orang, namun ada batasan minimal dan maksimal yaitu batas minimal pengeluaran aset sesuai dengan kebutuhannya sendiri, dan batas maksimal tergantung pada umat Islam dalam mengeluarkan hartanya. Prosedur pengelolaam infak

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

**c. Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)**

UU No.38 tahun 1999 telah diubah pada tanggal 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>

Badan Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan interpretasi dari Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Badan ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Prinsip penyelenggaraan zakat sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, kewenangan, kepentingan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas. Baik dari perspektif *muzakki* maupun *mustahik*, urgensi pengelolaan zakat merupakan alat untuk membantu pencapaian tujuan zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat merupakan alat untuk mengelola zakat yang dimulai dari penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat agar dapat dijalankan semaksimal mungkin. Jika

---

<sup>7</sup> Kalteng, kemenag.go.id, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, <https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/GONDO/5121567496646.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 15.27 WIB

pengelolaan zakatnya baik, maka berpotensi pengelolaannya juga baik. Demikian pula tanpa pengelolaan zakat yang baik, meskipun potensi zakatnya besar, tidak dapat dikelola dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Penelitian Amil Zakat Nasional (LAZNAS) akan menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban proses pelaksanaannya.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dalam "*Oxford English Dictionary*" adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang mengandung dua arti:

- a. *To give power to* (memberdayakan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan kekuasaan kepada pihak lain).
- b. *To give ability to, enable* (berusaha untuk memberdayakan).

Pemberdayaan berasal dari daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat agar dapat mewujudkan jati diri, aspirasi dan martabatnya semaksimal mungkin untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri secara mandiri.<sup>8</sup>

Pemberdayaan membuat individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian ini adalah kemandirian berpikir, bertindak dan

---

<sup>8</sup> Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Malang: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, 2009), 17

mengendalikan apa yang anda lakukan, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Menurut Adjid, otorisasi adalah suatu keadaan dinamis yang mencerminkan kemampuan suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan atau nilai yang diacunya (keinginan), oleh karena itu otorisasi berarti upaya (prosedur, proses) untuk mengembangkan sistem kemasyarakatan. mencapai tujuan berikut: mencapai tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat dirancang untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuannya sehingga bebas dan mampu menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan secara mandiri.<sup>9</sup> Unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup>

Kadarisman mengatakan, otorisasi merupakan proses menjadikan masyarakat lebih mampu atau lebih mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan yang diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab.<sup>11</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun masyarakat atau meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi melakukan tindakan praktis, dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat

---

<sup>9</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 28-29

<sup>10</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 88

<sup>11</sup> M.Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), 140

masyarakat dalam situasi saat ini dimana kemiskinan dan ketertinggalan masih belum dapat dielakkan.<sup>12</sup>

Menurut Widjaja, *community authorization* adalah pemberian kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan atau pemberian otonomi pada tingkat yang lebih rendah, intinya memberi kewenangan kepada masyarakat untuk bekerja keras menghasilkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuannya, dan melakukan perubahan daerah melalui otorisasi. harus lebih mampu dan mandiri yang artinya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri-ciri masyarakat dan membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Suharto, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat mandiri dan potensi kemampuannya. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan dua kelompok yang sering dikaitkan yaitu masyarakat sebagai pihak yang memberdayakan.<sup>14</sup> dan kepedulian terhadap masyarakat yang mampu mewujudkan haknya. Identitas dan tingkatkan martabat dan martabat mereka untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya<sup>15</sup>

Menurut Eko, pemberdayaan merupakan gerakan dan proses yang berkesinambungan untuk menghasilkan potensi, memperkuat partisipasi,

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Revika Aditama, 2014), 57.

<sup>13</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 77

<sup>14</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat.....* 76

<sup>15</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi .....*169



serta membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, hal ini merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas suatu masyarakat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat tersebut memiliki kapasitas dan kekuatan. Peningkatan kekuatan masyarakat merupakan upaya mewujudkan kemandirian masyarakat dengan mewujudkan potensi kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai motor penggerak untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas seluruh aspek masyarakat, sehingga mampu membangun masyarakat yang mandiri bebas dari kemiskinan dan ketertinggalan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut buku metodologi penelitian Drijver dan Sajise, ada lima prinsip utama pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eko Sutoro, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : APMD Press, 2004), 11

<sup>17</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 18

- a. Dalam hal ini, pengelola dan pemangku kepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai dari metode berikut (metode tombol), kemudian secara bertahap mengusulkan gagasan dan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Partisipasi: Setiap peserta memiliki kekuasaan di setiap tahap perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: menjalin kemitraan dengan semua sektor masyarakat untuk membuat program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Integritas: kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional dan nasional. Program pemberdayaan masyarakat yang memberikan bantuan keuangan harus memasukkan unsur-unsur yang biasanya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rencana tersebut harus mampu mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis

Menurut Robert Chambers, Konsep pemberdayaan merupakan pembangunan yang mengandung nilai-nilai sosial mencerminkan paradigma pembangunan baru yaitu pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, berdaya, dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan lebih luas dari pada upaya pemenuhan kebutuhan atau mekanisme (*basic need*) yang dibutuhkan untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Pemberdayaan berasal dari istilah *empowerment* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberdayaan yang artinya memberdayakan atau meningkatkan kekuatan masyarakat yang kurang

beruntung atau kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of dis-advantaged*).<sup>18</sup>

Menurut definisi Chambers tentang otorisasi dapat dijelaskan dari empat sudut pandang, yaitu: *pluralisme*, *elitisme*, *strukturalisme*, dan *post-strukturalisme*.

- a. Dari perspektif *pluralisme*, pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dapat membantu individu dan kelompok sosial yang kurang beruntung agar dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain. Pekerjaan pemberdayaan yang dilakukan adalah membantu mereka belajar, menggunakan keterampilan melobi, menggunakan media yang berkaitan dengan perilaku politik, dan memahami cara kerja sistem (aturan main). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara sehat, sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk mengajari kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam aturan (*how to compete with in the rules*).
- b. Dari perspektif *elitisme*, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk bergabung dan mempengaruhi elit, seperti tokoh atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain, untuk bersekutu dengan elit, melawan dan mencari perubahan dari elit. Mengingat elit memiliki kekuasaan dan kontrol yang kuat atas media, pendidikan,

---

<sup>18</sup>Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 21.

parpol, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen, membuat masyarakat tidak berdaya, maka upaya tersebut dilakukan.

- c. Dari perspektif *strukturalis*, pemberdayaan masyarakat merupakan agenda perjuangan yang lebih menantang. Tujuan otorisasi dapat dicapai dengan menghilangkan bentuk ketimpangan struktural. Biasanya, karena struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, orang akan menjadi tidak berdaya tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, ras, atau ras. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembebasan fundamental dan spiritual, perubahan struktural, dan upaya menghilangkan penindasan struktural.
- d. Dari perspektif *post-strukturalis*, memberdayakan komunitas adalah proses wacana yang menantang dan berubah. Fokus pemberdayaan lebih pada pengetahuan daripada pada aktivitas, tindakan atau praktik. Dalam perspektif ini pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya memahami perkembangan pemikiran baru dan analitis. Oleh karena itu, penekanan pada pemberdayaan dalam pendidikan bukanlah suatu tindakan.<sup>19</sup>

### **3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi pemahaman bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat tidak memiliki kekuasaan (*powerlessness*). Menurut Robert Chamber, konsep otorisasi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>19</sup> Ibid

dasar dan telah dikembangkan di masa lalu untuk mencari alternatif konsep pertumbuhan. Dalam upaya peningkatan kekuatan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Menciptakan suasana dimana potensi masyarakat dapat dikembangkan (*enabling*)

Di sini terlihat bahwa titik awal pemberdayaan adalah pengakuan bahwa setiap orang dan setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang, yang berarti tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Karena jika iya, maka akan punah. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kekuatan melalui dorongan, motivasi dan peningkatan kesadaran yang akan menjadikan masyarakat lebih mampu.

- b. Peningkatan potensi masyarakat (*empowering*)

Dalam hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah positif untuk menciptakan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah khusus, termasuk memberikan berbagai masukan dan membuka berbagai peluang untuk memperkuat berbagai peluang sosial

- c. Memberikan perlindungan (*protecting*), artinya yang lemah dan yang kuat harus dilindungi dalam proses pemberdayaan, bukan yang lemah tumbuh menjadi yang lemah.<sup>20</sup>

Dalam proses konteks pemberdayaan, yang terpenting adalah pendidikan, kesehatan, dan akses ke sumber daya kemajuan ekonomi

---

<sup>20</sup> Ibid

(seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar). Pemberian izin ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, seperti irigasi, listrik, jalan, dan kemasyarakatan, seperti sekolah dan sarana pelayanan kesehatan yang bisa langsung dijangkau masyarakat. Pemberdayaan mencakup tidak hanya penguatan individu, tetapi juga penguatan kelembagaan, penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, penghematan, keterbukaan dan tanggung jawab, serta keberadaan pranata sosial dan keterpaduannya dengan kegiatan pembangunan dan peran masyarakat di dalamnya

#### 4. Faktor Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat semakin bergantung pada program zakat, karena manfaat yang mereka nikmati pada dasarnya harus berasal dari usaha sendiri, dan hasilnya bisa digunakan atau ditukar dengan pihak lain. Tujuan akhir pemberdayaan adalah membuat masyarakat mandiri dan membangun kapasitas masyarakat agar dapat terus meningkatkan taraf hidupnya.<sup>21</sup>

Selain kurangnya potensi (*powerless*), faktor lain yang memberdayakan masyarakat adalah ketimpangan. Ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat yaitu :<sup>22</sup>

##### a. Ketimpangan Struktural

Hal ini terjadi antara kelompok besar, seperti perbedaan kelas antara yang kaya dan yang miskin dan antara pekerja, dan pengusaha,

---

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta : Kencana, 2013), 24-28.

Kesetaraan *non-gender*, perbedaan ras atau etnis tercermin dalam perbedaan antara penduduk lokal dan pendatang.

b. Ketimpangan Kelompok

Karena usia, orang muda, cacat fisik, mental dan intelektual, isolasi geografis dan sosial masalah *gay-lesbi* (keterbelakangan)

c. Ketimpangan Individu

Karena kematian, kehilangan orang yang dicintai, masalah pribadi dan alasan keluarga.

## 5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Ketika menelaah konsep pemberdayaan masyarakat, sebenarnya muncul dari perspektif memperlakukan manusia sebagai subyek dunianya sendiri. Model dasar dari gerakan pemberdayaan ini adalah membutuhkan tenaga dan lebih menekankan pada yang tidak berdaya. Otorisasi ini bersifat holistik, artinya mencakup semua aspek. Oleh karena itu, setiap sumber daya lokal harus diketahui dan dimanfaatkan. Ini untuk mencegah orang mengandalkan segalanya. Untuk diberdayakan, kelompok yang kurang beruntung harus mengadopsi beberapa strategi.

Strategi-strategi ini dapat diartikulasikan secara luas arti kebijakan dan rencana, tindakan sosial dan politik, serta pendidikan. Dengan merumuskan atau mengubah struktur dan lembaga untuk mencapai akses yang lebih adil ke sumber daya atau layanan dan peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pemberdayaan dapat dicapai dengan merumuskan rencana dan kebijakan, tindakan lain atau kebijakan

diskriminasi aktif juga mengakui keberadaan kelompok dan mencoba mengubah Aturan untuk memperbaiki situasi ini yang bermanfaat bagi yang kurang beruntung.

Dalam hal ini, penggunaan kebijakan ekonomi untuk mengurangi pengangguran juga dapat dilihat sebagai peningkatan kapasitas masyarakat, dalam hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang. Menyediakan sumber daya yang cukup adalah kebijakan untuk memastikan pendapatan yang cukup, dan ini juga merupakan proses peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan kekuatan efektif. Namun dalam manifesto ini, masyarakat lebih menitikberatkan pada pendekatan radikal dan berusaha memperkuat masyarakat dengan memungkinkan masyarakat lebih efektif dalam membekali diri di panggung politik.

Pemberdayaan melalui pendidikan menekankan pada pentingnya proses pendidikan dalam membekali masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaannya. Pemberdayaan semacam ini menggabungkan ide-ide peningkatan kesadaran, dapat membantu komunitas memahami komunitas dan struktur operasional, memberikan komunitas kosakata dan keterampilan untuk mencapai perubahan yang efektif dan melampaui dirinya sendiri.



Terlihat dari penjelasan di atas bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yaitu teori Robert Chambers yang merangkum konsep pengembangan nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang berorientasi pada masyarakat, partisipasi, pemberdayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki dua konsep utama yaitu konsep kekuasaan (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat berarti mengambil langkah atau upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik guna memenuhi kebutuhan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan mandiri.

Menurut Sumodiningrat, otorisasi tidak akan bertahan selamanya, tetapi sampai masyarakat sasaran bisa mandiri, bahkan dari kejauhan dilindungi agar tidak jatuh lagi.<sup>23</sup> Dari sudut pandang ini berarti memperoleh kemandirian melalui suatu masa studi, namun untuk mencapai kemandirian tetap perlu dijaga semangat, kondisi dan kemampuan agar tidak mengalami kemunduran lebih lanjut dengan latar belakang otorisasi komunitas, Proses pembelajaran akan dilakukan secara bertahap, meliputi :<sup>24</sup>

- a. Tahapan yang harus dilalui meliputi tahapan kesadaran dan tahapan pembentukan perilaku menjadi perilaku sadar dan peduli sehingga mereka merasa membutuhkan kemampuan sendiri.

---

<sup>23</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media. 2004), 82

<sup>24</sup> Ibid

- b. Tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan keterampilan yang membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat berperan dalam pembangunan.
- c. Tahapan peningkatan intelektual, Keterampilan memungkinkan rencana dan kemampuan inovatif untuk dibentuk, sehingga mencapai kemandirian.

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yaitu teori Robert Chambers yaitu suatu konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini merefleksikan paradigma pembangunan baru, yaitu *people-oriented, participatory, empowering and sustainable*. Konsep pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan dua konsep utama, yaitu: konsep kekuasaan (*power*) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan).

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan oleh empat sudut pandang, yaitu: *pluralisme, elitisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme*. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat berarti mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama dalam memperkuat fungsi atau tatanan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri, dengan teori ini penulis dapat membantu menganalisis hasil data yang dilakukan di lapangan, dan penulis dapat menjawab ungkapan pertanyaan penelitian.

Apabila hasil penelitian di atas tidak membahas kedua teori yang dijelaskan oleh Robbet Chambers, maka proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Kediri tidak akan berhasil. Jika otorisasi dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Robert Chambers, maka dapat dikatakan berhasil. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan pembangunan yang *people-oriented, partticipatory, empowering and sustainoble*. Paradigma pembangunan baru, pemberdayaan memiliki empat kelompok *pluralisme, elitisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme*.

## C. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efek yang memiliki beberapa arti yaitu efek (efek, pengaruh dan kesan), efektif atau efektif, membawa hasil, sukses (tindakan usaha) dan mulai membawa efek, kata efektivitas muncul dari arti tersebut. dijelaskan sebagai situasi, pengaruh, kesan, khasiat dan kesuksesan.<sup>25</sup> Sedangkan efektivitas juga dapat disebut sebagai hasil penggunaan yang berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sudah diperoleh.<sup>26</sup>

Kata yang efektif berasal dari bahasa Inggris yang *efektif* berarti bekerja, sesuatu yang berhasil dilakukan.<sup>27</sup> Konsep efektivitas adalah

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 284.

<sup>26</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan* (TK : Celebes Media Perkasa, 2017), 74.

<sup>27</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129

konsep luas, yang mencakup berbagai faktor di dalam dan di luar organisasi.<sup>28</sup> Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output untuk mencapai tujuan, semakin banyak organisasi, program, atau kegiatan yang lebih efektif.<sup>29</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau tujuan yang tepat dan mencapainya. Oleh karena itu efektivitas mengacu pada hubungan antara output atau apa yang telah dicapai atau hasil aktual dicapai oleh tujuan atau apa yang telah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks pencapaian tujuan, efektivitas berarti melakukan hal-hal yang benar atau melakukan pekerjaan yang tepat. Efektivitas mengacu pada keberhasilan mencapai target organisasi, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer melakukan pekerjaan yang tepat. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mewujudkan tujuannya. Efektivitas organisasi adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.<sup>30</sup>

Definisi ahli tentang efektivitas, menurut Siagan efektivitas yaitu penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana secara sadar dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan banyak aktivitas, barang dan jasa. Efektivitas mengacu pada apakah tujuan berhasil dicapai. Jika

---

<sup>28</sup> Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11

<sup>29</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86.

<sup>30</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.

hasil dari kegiatan tersebut mendekati tujuan maka efektivitasnya akan semakin tinggi.

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur menurut sejauh mana tingkat output atau output kebijakan harus mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, istilah efektivitas mengacu pada pencapaian suatu tujuan atau hasil yang diinginkan, yang terkait dengan energi, waktu, biaya, ide, alat, dan lainnya telah ditentukan.<sup>31</sup>

Memperhatikan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang terjadi karena hasil yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang melakukan operasi untuk tujuan tertentu dan perilaku yang diinginkannya, maka jika hasil yang diperoleh memenuhi persyaratannya, maka perilaku orang tersebut dianggap efektif.

## **2. Mengukur Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah tugas yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut, dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi dapat memahami bahwa efisiensi mengacu pada kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Efektivitas dapat diukur dengan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Efektivitas dapat diukur

---

<sup>31</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan.....* 76

dari berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat beroperasi secara efektif. Yang terpenting, keefektifan tidak menunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Efektivitas hanya memeriksa apakah proses rencana atau aktivitas telah mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>32</sup>

Efektivitas rencana perlu dievaluasi untuk menemukan informasi tentang sejauh mana rencana menguntungkan dan berdampak pada penerima rencana, yang juga menentukan apakah suatu rencana dapat dilanjutkan. Tanda-tanda efektifnya implementasi rencana adalah sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu,
- 2) Sumber daya manusia untuk mengelola rencana
- 3) Mekanisme kerja yang baik,
- 4) Pengaturan prioritas kerjasama
- 5) Komunikasi antar anggota organisasi,
- 6) Alokasi dana yang tepat,
- 7) Tidak ada penyimpangan,
- 8) Pemantauan
- 9) Evaluasi lihat program umpan balik (feedback program).<sup>33</sup>

Menurut Richard M. Steers, ia menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang, UMM Press, 2004) hal 294

<sup>33</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan.....*, 79.

- 1) Pencapaian tujuan adalah seluruh upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, sehingga pencapaian tujuan akhir semakin dijamin, diperlukan penelusuran, baik dalam arti menelusuri pencapaian bagian-bagiannya dan bertahap dalam arti periodisasi. Pencapaian gol terdiri dari beberapa faktor, yaitu: waktu dan target yang merupakan target kongkret.
- 2) Integrasi adalah pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk itu digunakan untuk menolak ukuran pengadaan dan pengisian tenaga kerja

### 3. Model Efektivitas

Menurut Richard M Steers efektivitas dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Model Optimasi Target, Menggunakan model optimasi untuk efektivitas organisasi dapat membuat orang menyadari bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, nilai kesuksesan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil dengan tujuan organisasi.

---

<sup>34</sup> Richard dan M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 53

<sup>35</sup> Ibid

- 2) Dari perspektif sistem, fokus pada hubungan antara berbagai komponen di dalam dan di luar organisasi. Meskipun komponen tersebut secara bersama-sama mempengaruhi sukses tidaknya organisasi. Oleh karena itu, model tersebut berfokus pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
- 3) Menekankan perilaku, dalam model ini efektivitas organisasi dapat dilihat dari keterkaitan antara kebutuhan organisasi dengan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan sangat besar.

Berdasarkan definisi efektivitas yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa efektivitas diartikan sebagai pencapaian suatu tujuan, maksud atau hasil yang telah ditentukan sebelumnya dari suatu kegiatan. Dengan kata lain validitas adalah perbandingan antara hasil dan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkait dengan pencapaian program pengelolaan dana koin NU peduli *one day one thousand* dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **4. Faktor-Faktor Efektivitas**

Peneliti menggambarkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dijelaskan oleh Richard M Steers :<sup>36</sup>

- 1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap, seperti komposisi sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur adalah cara unik menempatkan orang untuk

---

<sup>36</sup> Ibid



membuat organisasi. Dalam struktur ini, orang ditempatkan sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan perilaku berorientasi tugas.

- 2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar lingkup organisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang disebut lingkungan organisasi, yaitu lingkungan keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam efisiensi. Banyak perbedaan yang ditemukan dalam diri setiap orang, namun kesadaran individu akan perbedaan tersebut sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika suatu organisasi ingin sukses, maka harus dapat mengintegrasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen adalah sejenis strategi dan mekanisme kerja yang bertujuan untuk menangani secara bersyarat segala sesuatu yang ada dalam organisasi untuk mencapai efektivitas. Kebijakan dan praktik manajemen adalah alat bagi para pemimpin untuk memandu setiap aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi

## 5. Metode Efektivitas

Dalam mengevaluasi program efektivitas, Tayibnafis menjelaskan berbagai metode pendekatan evaluasi. Metode-metode tersebut adalah:<sup>37</sup>

1) Metode eksperimen (*experimental approach*).

Metode ini berasal dari eksperimen terkontrol yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan umum tentang dampak program tertentu dengan mengendalikan sebanyak mungkin faktor dan mengisolasi pengaruh program.

2) Pendekatan berorientasi tujuan (*goal oriented approach*).

Metode ini menggunakan tujuan rencana sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Metode ini sangat masuk akal dan praktis untuk pengembangan dan desain program. Metode ini memberikan panduan bagi pengembang program dan menjelaskan hubungan antara aktivitas spesifik yang diberikan dan hasil yang ingin dicapai.

Target penting dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas dengan pendekatan ini adalah target realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan target resmi (*official goal*) dengan memperhatikan masalah, dengan memfokuskan pada aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

---

<sup>37</sup> Ali Muhidin Sambas, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009), 23-26

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan target yang akan dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu implementasi. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu berisi implementasi, waktu implementasi dan tujuan pencapaian dengan waktu yang tepat dan program akan lebih efektif.<sup>38</sup>

- 3) Metode yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*).

Pendekatan ini menekankan pada peran sistem informasi bagi manajer rencana dalam menjalankan tugasnya. Dalam pandangan ini, jika informasi tersebut dapat membantu manajer rencana mengambil keputusan, itu akan sangat berguna. Oleh karena itu evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan keputusan program.

- 4) Pendekatan berorientasi pengguna (*the user oriented approach*).

Metode ini berfokus pada penilaian masalah pemanfaatan dan berfokus pada penggunaan informasi yang diperluas. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan informasi secara potensial. Dalam hal ini, evaluator menyadari banyak faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan evaluasi, seperti cara menangani pelanggan, kepekaan, faktor-faktor kondisional, seperti kondisi yang ada, kondisi organisasi dengan pengaruh komunitas, dan situasi evaluasi. dan laporkan. Dalam metode ini, interpretasi dari teknik

---

<sup>38</sup> Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), 9.

analisis data atau tujuan evaluasi adalah penting, tetapi tidak sepenting upaya pengguna dan cara informasi digunakan.

5) Pendekatan responsif (*the responsive approach*).

Metode responsif menekankan bahwa evaluasi yang bermakna adalah evaluasi yang bertujuan untuk memahami masalah dari perspektif yang berbeda dari semua orang yang terlibat, tertarik, dan tertarik pada rencana (*stakeholder program*). Penilai menghindari jawaban atas evaluasi rencana yang diperoleh dengan menggunakan tes, kuesioner atau analisis statistik, karena setiap orang yang terpengaruh oleh rencana memiliki perasaan yang unik. Penilai mencoba menjembatani masalah yang berkaitan dengan penggambaran atau penggambaran realitas melalui perspektif orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami program dari berbagai perspektif.

6) Pendekatan proses (*Internal Process Approach*).

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan lembaga internal. Di lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian yang ada dikoordinasikan. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan tetapi berfokus pada kegiatan yang dilakukan pada sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.

Menggabungkan dengan hal di atas, efektivitas menggambarkan keseluruhan siklus *input*, proses dan *output*. Ini mengacu pada hasil yang berguna dari suatu organisasi, rencana atau kegiatan. Hasilnya menunjukkan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) tercapai dan pengukuran keberhasilan atau kegagalan metode dimana organisasi dapat mencapai tujuannya dan mencapai tujuannya. Artinya, konsep yang berkaitan dengan efektivitas hanyalah hasil atau tujuan yang diinginkan.